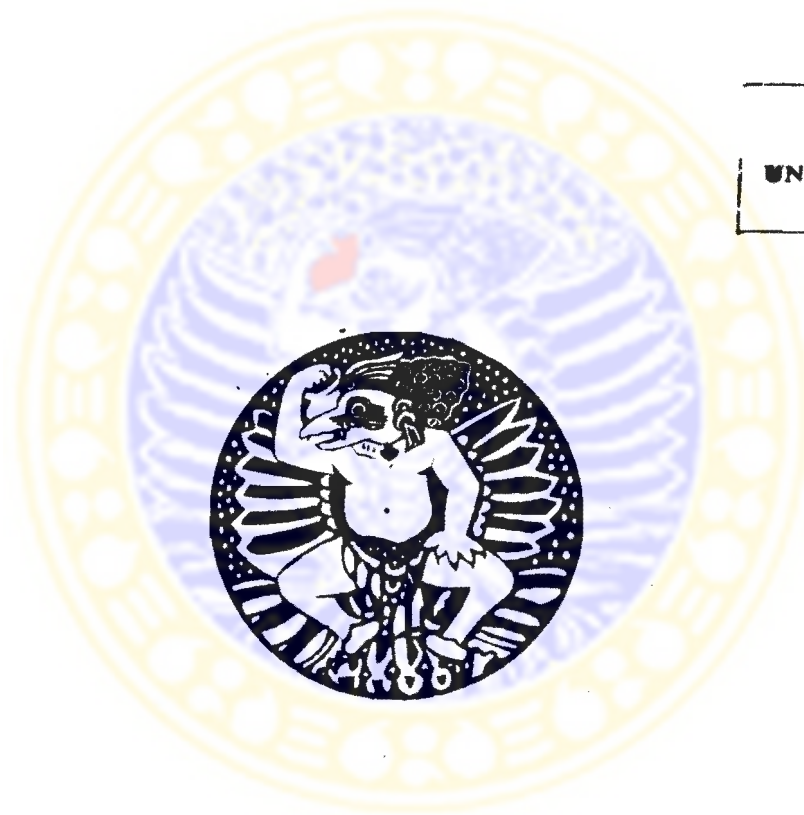


SKRIPSI

Irma Sulistyarini

KEKUATAN MENGIKAT MEMORANDUM OF UNDERSTANDING TERHADAP PARA PIHAK



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

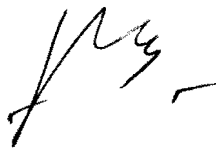
KEKUATAN MENGIKAT MEMORANDUM OF UNDERSTANDING TERHADAP PARA PIHAK



SKRIPSI

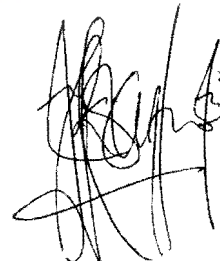
**DIAJUKAN SEBAGAI PENULISAN AKHIR
PROGRAM SARJANA BIDANG ILMU HUKUM**

**Menyetujui,
Dosen Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, belonging to the supervisor, Y. Sogar Simamora.

Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum
NIP. 131670342

Penulis

A handwritten signature in black ink, belonging to the author, Irma Sulistyarni.

Irma Sulistyarni
NIM. 039514179

BAB IV

PENUTUP

1. *Kesimpulan*

Dari pembahasan yang telah penulis uraikan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yakni :

- a. Kekuatan mengikat dari *Memorandum Of Understanding* terhadap para pihak hanya sebatas kekuatan mengikat secara moril. Karena MOU hanyalah sebuah kesepakatan atau yang sering kita sebut dengan Nota Kesepakatan atau *Letter of Intent* yang didalamnya hanya berisi kesepakatan kedua belah pihak untuk mengadakan perjanjian lebih lanjut yang lebih rinci, dan juga pada MOU tidak mengatur tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak. Sebuah perjanjian mengikat secara hukum apabila terdapat hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang menandatangani.
- b. Upaya hukum yang lebih tepat bagi pihak yang merasa dirugikan akibat tidak dilaksanakannya MOU oleh salah satu pihak adalah dengan cara menggugatnya ke Pengadilan berdasarkan pasal 1365 BW yaitu perbuatan melanggar hukum. Dasar gugatan ini lebih tepat daripada

menggugat berdasarkan wanprestasi, karena pada MOU tidak terdapat prestasi yang wajib dilaksanakan oleh salah satu pihak sebagai syarat mutlak seseorang dinyatakan telah wanprestasi atau tidak.

2. Saran

Berdasarkan dari pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran yang sekiranya dapat berguna bagi kita semua. Saran-saran yang dapat penulis berikan tersebut adalah sebagai berikut ;

- a. Penulis menghimbau kepada Pemerintah, agar secepatnya membentuk suatu peraturan yang khusus mengatur tentang MOU, karena saat ini telah banyak pihak menggunakan MOU untuk menunjang kegiatan bisnisnya. Terlebih lagi untuk menghadapi era pasar bebas yang sebentar lagi akan kita lewati, tentunya instrumen hukum yang kita miliki harus segera kita benahi khususnya peraturan tentang MOU untuk lebih menjamin kepastian hukum bagi para pihak nantinya.
- b. Apabila ada salah satu pihak dalam MOU yang merasa dirugikan akibat dari tidak dilaksanakannya MOU tersebut, seyogianya untuk melindungi

hak-haknya sendiri, pihak tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan dasar perbuatan melanggar hukum seperti yang telah diatur pada pasal 1365 BW.

